

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Ngani, Nico, I. Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.

Pangaribuan, Luhut M.P., 2016, *Hukum Pidana Khusus tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Jakarta

Poernomo, Bambang, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta.

-----, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Sorjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 52523)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5298)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5785)

Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/PDK.02/2014 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Kerja

Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/PDK.01/2015 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEDK.01/2015 Tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Jurnal, Internet, dan Sumber Lain

Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan” *Jurnal Value Added*, Vol. 8 No. 2, 2012, diakses dari

<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716/769>

Wahyu Wiriadinata, “Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan di Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 3 pada Oktober 2012 diakses dari

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2373_JLI%20Vol.%209%20No.%203.pdf

Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan” *Jurnal*

Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3, 2012 diakses dari

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2373_JLI%20Vol.%209%20No.%203.pdf

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2021-1-2015.pdf>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10224/skripsi%20yang%20mau%20dibakar.pdf?sequence>

<http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Pages/Laporan-Triwulanan-OJK-IV-2016.aspx>

Nota Kesepahaman Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor PRJ-36/D.01/2014, B/44/XI/2014 Tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

Nota Kesepakatan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor PRJ-06/D.01/2016, KEP-426/A/JA/06/2016 Tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Dalam Penanganan Perkara Di Sektor Jasa Keuangan.